

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama islam, bahkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia walaupun sejatinya Indonesia bukanlah negara islam, negara dimana segalanya didasarkan pada hukum islam. Islam merupakan agama yang paling sempurna karena semua perkara sudah diatur dengan sempurna, dari mulai perkara kecil hingga perkara yang besar. Begitu juga mengenai solusi untuk mengentaskan kemiskinan juga sudah diatur dengan sempurna dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kita tahu bahwasanya upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran selalu menjadi agenda kerja bagi pemerintah Indonesia di setiap periodenya. Banyak kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan namun belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bekerja dan berusaha merupakan perintah dalam agama islam. Bekerja selain bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan fisik juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Islam juga memiliki ayat-ayat yang menyemangati setiap individu untuk giat bekerja, mandiri dan mencari rizki. Salah satu ayat yang artinya adalah sebagai berikut:

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”* (Al-Jumu'ah ayat 10).

Ayat tersebut berisikan perintah untuk giat dan semangat dalam bekerja dengan berusaha mencari rizki yang halal setelah ditunaikannya sholat yang merupakan kewajiban utama umat islam. Serta dengan selalu mengingat Allah dalam mengerjakan usahanya agar mendapat keberuntungan dan terhindar dari sikap curang, penyelewengan, dll.

Salah satu bentuk bekerja dan usaha yang dapat dilakukan untuk terbebas dari belenggu kemiskinan adalah dengan menjadi individu yang memiliki sifat produktif dan mandiri, yaitu dengan menjadi seorang pengusaha. Pengusaha merupakan seseorang yang mampu mengelola sumber daya di sekitarnya menjadi sebuah bisnis guna menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraannya bahkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Banyak hadist Rasulullah SAW yang mendukung semangat menjadi pengusaha, salah satunya adalah hadist berikut ini:

*Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata*

*Rasulullah SAW ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik". (HR. Thabrani dalam Al Mu'jam Kabir)*

Saat ini, jumlah rasio pengusaha di Indonesia masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah rasio pengusaha di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS, rasio wirausaha Indonesia pada 2013/2014 hanya sebesar 1,67%, kemudian di tahun 2016 naik menjadi 3,1%. Dengan demikian, Indonesia sudah memenuhi standar minimal suatu masyarakat yang sejahtera yaitu 2% dari total penduduknya

merupakan seorang pengusaha. Namun, angka ini masih terpaut jauh dari negara tetangga. Malaysia memiliki rasio kewirausahaan yang lebih tinggi dari Indonesia, yakni sebesar 6%. Singapura dan Thailand masing-masing memiliki tingkat rasio kewirausahaan sebesar 7% dan 5%.

Berdasarkan data, pengusaha di Indonesia didominasi oleh pengusaha yang bergerak di unit usaha kecil dan mikro. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1 yaitu tentang perkembangan unit usaha di Indonesia tahun 2012-2013.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Unit Usaha di Indonesia Tahun 2012-2013 (Unit)**

Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha		Persentase Jumlah Unit Usaha	
	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2013
Usaha Mikro	55 856 176	57 189 787	98,79%	98,77%
Usaha Kecil	629 418	654 222	1,11%	1,13%
Usaha Menengah	48997	52 106	0,09%	0,09%
Usaha Besar	4 968	5 066	0,01%	0,01%
Jumlah Unit Usaha	56 539 560	57 901 181	100%	100%

Sumber : data primer diolah dari Kementerian Koperasi dan UKM, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya persentase jumlah unit usaha mikro dan kecil mendominasi unit usaha di Indonesia. Serta dapat dilihat bahwa seluruh jenis unit usaha mengalami kenaikan pada jumlah unit usaha dari tahun 2012-2013. Hal ini menandakan bahwa semangat wirausaha di Indonesia terus tumbuh setiap tahunnya.

Di samping kabar baik tentang meningkatnya jumlah pengusaha di Indonesia, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengusaha terkait dengan

kinerja keuangan dari usahanya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan BPS pada tahun 2003 dalam Sulaeman (2015) menunjukkan bahwa hanya sebesar 27,53% unit usaha yang tidak mengalami kesulitan usaha, dan sebesar 72,47% mengalami kesulitan usaha. Faktor-faktor yang menjadi kendala adalah sebagai berikut: faktor permodalan (51,09%), faktor pemasaran (34,72%), faktor bahan baku (8,59%), faktor ketenagakerjaan (1,09%), faktor distribusi transportasi (0,22%), dan faktor lainnya (3,93%). Dari data tersebut, terlihat bahwa kendala terbesar pengusaha yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah adalah karena keterbatasan modal usaha dan kekurangcakapan dalam mengelola modal usaha. Untuk mengatasi masalah keterbatasan modal usaha, saat ini inklusi keuangan dari lembaga keuangan semakin gencar dilakukan guna meningkatkan dukungannya terhadap pengusaha yang membutuhkan layanan produk/ jasa keuangan dengan memberikan kredit usaha. Selain itu, peningkatan jumlah lembaga keuangan juga semakin pesat, khususnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah.

Pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali setelah krisis ekonomi di tahun 1997. Pertumbuhan ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah bank syariah, BPRS, dan BMT. Menurut data dari OJK jumlah bank syariah di Indonesia pada tahun 1998 hanya ada satu bank syariah, namun hingga Agustus 2017 meningkat menjadi 13 bank syariah dengan 1.837 kantor, 167 BPRS dan 4.500 BMT di seluruh Indonesia. Hal ini menandakan bahwa lembaga keuangan syariah siap berperan untuk mendukung program inklusi keuangan di Indonesia.

Pertumbuhan pada lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi pengusaha muslim di Indonesia terutama sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha yang terbebas dari unsur riba. Namun, permasalahan keuangan usaha tidak hanya berbicara tentang modal usaha saja. Hal penting lain terkait keuangan usaha adalah bagaimana tingkat pengetahuan keuangan pelaku usahanya. Walaupun inklusi keuangan oleh lembaga keuangan syariah sudah baik, namun jika pelaku usahanya belum dapat mengelola keuangan usahanya dengan bijak maka hal tersebut menjadi kendala untuk meningkatkan kinerja keuangan usahanya. Literasi keuangan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan masyarakat luas dengan tujuan supaya dapat mengelola keuangan dengan lebih baik (OJK, 2013). Sedangkan inklusi keuangan adalah upaya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses untuk memanfaatkan layanan produk dan jasa keuangan dengan mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga ataupun non harga sehingga memberikan manfaat terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat (OJK, 2013).

Pada tahun 2013, OJK melakukan survei mengenai tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia. Hasil survei memperlihatkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang tergolong dalam *well literate* hanya sebesar 21,84%. Kemudian tingkat inklusi keuangan tergolong *moderate*, yaitu sebesar 59,74%.

Fatoki (2014) menyatakan bahwa dengan memiliki kecakapan/keterampilan literasi keuangan yang baik, seorang pelaku usaha diharapkan dapat membuat dan menghasilkan keputusan keuangan yang tepat dan efisien dalam hal

keuangan usahanya. Banyak pengusaha yang usahanya gulung tikar karena kesalahan dalam hal pengelolaan keuangan dan berimbas pada penurunan kinerja keuangan usaha. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Karisma Ardi (2017) beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang pengusaha terkait dengan pengelolaan keuangan usahanya yaitu mencampuradukkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, minimnya pengetahuan di bidang akuntansi, tidak jelas atau tidak adanya rencana keuangan, kurang memahami mengenai pentingnya arus kas dalam usaha, dan ketidaksadaran akan pentingnya pengelolaan modal di awal usaha.

Kemudian, Joo dan Grable (2000) menyatakan bahwasanya literasi keuangan memang perlu dikuasai dan dipraktikkan oleh seorang pengusaha. Alasan di balik mengapa seorang pengusaha sering membuat sebuah keputusan keuangan yang tidak tepat dan tidak efektif sehingga menyebabkan bisnisnya gagal yaitu karena kurangnya pengetahuan mengenai manajemen keuangan, kompleksitas masalah keuangan, beragamnya produk dan jasa keuangan, serta menganalisis berbagai macam prosedur yang kompleks ketika mengajukan pinjaman dana.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Njoroge (2013), Bruhn & Zia (2013) Fatoki (2014), Adomako & Danso (2016), Aribawa (2016), dan Eniola & Entebang (2016) telah mengkonfirmasi bahwasanya literasi keuangan seorang pengusaha berpengaruh terhadap kinerja keuangan dari usahanya, dimana kemampuan tersebut berguna untuk mengenali dan mengakses sumber daya keuangan dan menentukan keputusan yang bijak terkait masalah keuangan.

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Eresia dan Rath (2013) menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara literasi keuangan dari *young entrepreneur* di Asia Selatan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan.

Selanjutnya, inklusi keuangan merupakan langkah pemerintah untuk mendorong masyarakat agar mendapatkan akses keuangan formal terutama bagi masyarakat yang berada di kelompok *in the bottom of the pyramid*. Masyarakat dalam kelompok tersebut merupakan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah pinggiran dan terpencil termasuk pengusaha yang masih *unbankable* supaya dapat mengakses dengan mudah dan cepat berbagai layanan dan produk dari jasa keuangan formal guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Koomson dan Ibrahim (2017) tentang dampak inklusi keuangan pada *non-farm enterprise* di daerah perkotaan dan pedesaan menunjukkan hasil bahwa inklusi keuangan berdampak pada pertumbuhan kinerja dari *non-farm enterprise* di kedua daerah tersebut. Kemudian penelitian oleh Afrin et.al (2017) yang meneliti tentang dampak inklusi keuangan terhadap efisiensi teknis pada petani di Bangladesh menunjukkan hasil bahwa petani yang mengambil kredit untuk operasional mereka tingkat efisiensinya lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang tidak mengambil kredit.

Telah banyak literatur yang mengkonfirmasi bahwasanya salah satu indikator inklusi keuangan yaitu kemudahan akses terhadap lembaga keuangan akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan dari usahanya (Beck & Kunt,

2006; Mazanai & Fatoki, 2012; Muzaffar & dkk, 2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Babajide (2012) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh akses keuangan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan kemudahan akses untuk melakukan pinjaman tidak didukung dengan kecukupan jumlah pinjaman yang didapatkan dengan kebutuhan modal dan juga periode waktu pengembalian yang pendek.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu antara literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan, terlihat adanya perbedaan hasil penelitian. Menurut Baron dan Kenny (1986) jika terjadi perbedaan dari hasil penelitian atau teori karena adanya perbedaan perilaku individu, diindikasikan bahwasanya ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang berperan sebagai moderator. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hite dan Hesterly (2001); Lechner, Dowling & Welpel (2006); Setyawati, Shariff & Saud (2011); James Peprah (2013); dan Asad dkk (2016) menunjukkan bahwasanya *entrepreneurial networking* memiliki pengaruh untuk meningkatkan kinerja dari sebuah usaha. Sebuah studi yang dilakukan oleh Muzaffar, dkk (2016) menunjukkan bahwasanya *entrepreneurial networking* memiliki pengaruh yang signifikan sebagai moderating antara akses keuangan terhadap kinerja keuangan bisnis di Punjab, Pakistan. Akses keuangan merupakan salah satu indikator inklusi keuangan yang tidak hanya berbicara tentang kemudahan namun juga tentang *timeliness* (Babajide A. , 2015).

Informasi, *moral support*, ilmu manajemen dan pengalaman bisnis dari rekan pengusaha merupakan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh seorang



pengusaha. Dukungan tersebut dapat diperoleh apabila pelaku usaha memiliki *entrepreneurial networking* yang baik dan luas (Kheng, 2012). Selain itu, *entrepreneurial networking* juga sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat, mendapatkan peluang-peluang usaha yang baru dan ide baru juga merupakan manfaat memiliki *entrepreneurial networking*. Salah satu langkah untuk memperluas *entrepreneurial networking* seorang pengusaha adalah dengan bergabung ke dalam komunitas atau perkumpulan para pengusaha (Okten & Osili, 2004).

Saat ini, banyak sekali komunitas atau asosiasi pengusaha muslim yang terbentuk dengan tujuan untuk mendorong kegiatan dan minat bisnis bagi masyarakat muslim, terutama bagi pengusaha muslim. Di kota Semarang sendiri terdapat beberapa komunitas/ asosiasi pengusaha muslim yang sudah berdiri lama dan memiliki banyak anggota, yaitu: komunitas *Indonesian Islamic Business Forum* (IIBF), Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI), Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia (Alisa Khadijah) dan Masyarakat Tanpa Riba (MTR). Komunitas-komunitas ini bergerak untuk mendorong kegiatan bisnis menurut ajaran islam, salah satunya adalah dengan gerakan anti riba dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada anggotanya untuk tidak menabung dan melakukan utang pada lembaga keuangan konvensional. Pengusaha muslim di komunitas ini mayoritas sudah menjadi nasabah di lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, BPRS dan beberapa menjadi anggota BMT. Mereka menggunakan produk dan jasa yang tersedia di lembaga keuangan syariah guna

menunjang kegiatan bisnisnya, terutama pembiayaan syariah untuk tambahan modal usaha.

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara terhadap Ketua IIBF Semarang, Ketua JPMI, Ketua Alisa Khadijah dan Ketua MTR bahwa pengusaha muslim yang tergabung dalam komunitas tersebut mayoritas adalah pengusaha yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam wawancara tersebut Ketua IIBF Semarang, Ketua JPMI, Ketua Alisa Khadijah dan Ketua MTR juga mengatakan bahwasanya belum semua pengusaha muslim di wilayah kota Semarang yang menjadi anggota komunitas tersebut mampu menjaga kinerja keuangan usahanya untuk tetap stabil atau meningkat, beberapa pengusaha memiliki kinerja keuangan yang tidak stabil. Kendala yang dihadapi oleh pengusaha muslim terkait masalah kinerja keuangan usahanya disebabkan karena minimnya literasi keuangan yang dimiliki dan keterbatasan modal usaha untuk mengembangkan usahanya karena inklusi keuangan oleh lembaga keuangan syariah belum optimal dalam mendukung pengusaha-pengusaha sektor UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengusaha muslim memiliki kendala dalam hal permodalan dan pengelolaan keuangan usaha sehingga menjadi hambatan untuk meningkatkan kinerja keuangan usahanya. Permasalahan keuangan ini diakibatkan karena literasi keuangan yang masih rendah dan inklusi keuangan lembaga keuangan syariah yang belum optimal pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui produk-produk pembiayaan syariah.

Kemudian, adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten tentang pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan yang diindikasikan terdapat faktor lain yang berperan sebagai moderating, yaitu *entrepreneurial networking*. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pengusaha yang memiliki literasi keuangan yang baik dan inklusi keuangan yang bagus belum tentu juga mampu meningkatkan kinerja keuangan usahanya, karena sebuah usaha juga memerlukan dukungan dari pengusaha lainnya melalui *entrepreneurial networking* yang dimiliki.

Belum adanya studi terdahulu tentang *entrepreneurial networking* sebagai moderating variabel antara literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Peran *Entrepreneurial Networking* dalam Memoderasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pengusaha Muslim di Kota Semarang.

## **1.2 Rumusan masalah**

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat literasi keuangan pengusaha muslim di kota Semarang?
- b. Bagaimana tingkat inklusi keuangan oleh lembaga keuangan syariah di kota Semarang menurut pengusaha muslim?
- c. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan?
- d. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan?

- e. Bagaimana peran *entrepreneurial networking* dalam memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan?
- f. Bagaimana peran *entrepreneurial networking* dalam memoderasi pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis tingkat literasi keuangan pada pengusaha muslim yang menjadi anggota komunitas bisnis muslim di kota Semarang.
- b. Menganalisis tingkat inklusi keuangan oleh lembaga keuangan syariah di kota Semarang.
- c. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan.
- d. Mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan.
- e. Mengetahui peran *entrepreneurial networking* dalam memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan
- f. Mengetahui peran *entrepreneurial networking* dalam memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Aspek teoritis (keilmuan) :  
Aspek teoritis penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan literasi dan inklusi keuangan.
- b. Aspek praktis (guna laksana):

Aspek praktis dalam penelitian ini adalah sebagai dasar pengambilan keputusan bagi lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanannya bagi nasabah dalam menyalurkan pembiayaan dan sebagai

referensi tambahan bagi pengurus komunitas terkait tingkat kemanfaatan yang dirasakan anggotanya.